

The implementation of the Social Safety Net policy in Panggungharjo Village has been going on since 2013. The policy aimed to provide certainty for vulnerable groups in obtaining social security, especially in Panggungharjo Village. Social security certainty is outlined in Village Regulation No.1 of 2013 regarding guidelines for the implementation of social safety nets and Regulation of head village in Panggungharjo No.11 of 2013 concerning the establishment of a social safety net implementing agency. This study used Edwar III's policy implementation theory: communication and resource factors, (Van Meter & Van Horn, Cheema & Rondinelli, O'Toole & Montjoy, Hall & O'Toole: inter-agency relationship factors), William H. Newman: supervisory factors, and Grindle: the factor of policy content.

This study aimed to describe the process of implementing the Social Safety Net policy in Panggungharjo Village and also described the success and failure factors as well as the barriers or obstacles in implementing the social safety net policy in Panggungharjo Village, Sewon, Bantul, DIY. There were 11 informants in this study, consisting of 7 people from the village government, 3 people from social safety net beneficiary representatives, and 1 interviewee from the social safety net service providers, namely: third parties from village government partners who provide social security services. This study used a qualitative descriptive approach by interviews the government village, the social Safety Net Implementing Agency or Bapel-JPS staff, relevant agencies, and community.

The results of this study indicated that the process of implementing the Social Safety Net policy in Panggungharjo Village has been carried out very well, as well as has The SOP of Social Safety Net, the implementers have implemented the provisions in the standard operating procedure (SOP), besides that the support given was right on target and according to the needs of beneficiaries. Meanwhile, the inhibiting factors for the implementation of the social safety net policy in Panggungharjo Village are budget and equipment. Besides that, communication and inter-agency relations that are not optimal, they become other inhibiting factors. This study can be a reference for improving the quality about policy implementation to the village government. This study is also expected to provide an overview of the factors that influence the implementation of the social safety net program in Panggungharjo Village.

Keywords: Social safety net, programs, policies, factors, barriers, communication, resources

Implementasi kebijakan Jaring Pengaman Sosial di Desa Panggungharjo telah berlangsung sejak tahun 2013, tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk memberikan kepastian bagi kelompok rentan dalam mendapatkan jaminan sosial khususnya di Desa Panggungharjo. Kepastian jaminan sosial dituangkan melalui Peraturan Desa No 1 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan jaring pengaman sosial dan Peraturan Lurah Desa Panggungharjo no 11 tahun 2013 tentang pembentukan badan pelaksana jaring pengaman sosial. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edwar III: faktor komunikasi dan sumberdaya, (Van Meter & Van Horn, Cheema & Rondinelli, O'Toole & Montjoy, Hall & O'Toole: faktor hubungan antar instansi), William H. Newman: faktor pengawasan, dan Grindle: faktor konten kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan Jaring Pengaman Sosial di Desa Panggungharjo dan mendeskripsikan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan serta kendala atau hambatan dalam implementasi kebijakan jaring pengaman sosial di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, DIY. Informan dalam penelitian ini sebanyak 11 narasumber, yang terdiri dari: 7 orang dari unsur pemerintah desa, 3 orang dari masing-masing perwakilan penerima bantuan jaring pengaman sosial, dan 1 narasumber dari pemberi bantuan jaring pengaman sosial yakni: pihak ketiga dari mitra pemerintah desa yang memberikan layanan jaminan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara kepada desa, Staff Bapel-JPS, instansi terkait, dan warga masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan Jaring Pengaman Sosial di Desa Panggungharjo telah dijalankan dengan baik, sudah memiliki SOP Jaring Pengaman Sosial, para pelaksana sudah menjalankan ketentuan yang ada di dalam SOP, selain itu bantuan yang diberikanpun sudah tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penerima bantuan. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan jaring pengaman sosial di Desa Panggungharjo adalah sumberdaya anggaran dan sumberdaya perlengkapan. Selain itu faktor komunikasi dan hubungan antar instansi yang tidak optimal menjadi faktor penghambat lainnya. penelitian ini dapat menjadi rujukan perbaikan kualitas implementasi kebijakan bagi pemerintah desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implemetasi program jaring pengaman sosial di Desa Panggungharjo.

Kata kunci: Jaring pengaman sosial, program, kebijakan, faktor, penghambat, komunikasi, sumberdaya